

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Umat manusia secara alamiah adalah kelompok sosial dan cenderung hidup bersama.¹ Hal ini dikarenakan, kapasitas individu yang tidak memungkinkan mereka memenuhi kebutuhan dasarnya atau bahkan untuk mempertahankan diri, manusia sangat memerlukan bantuan dan kerjasama dengan yang lain, tetapi manusia tidak dapat hidup bersama dan bekerjasama dalam suasana konflik, permusuhan (*'udwan*) dan ketidakadilan (*zhalim*).² Maka disamping itu membuat kehidupan sosial tidak mungkin diwujudkan, untuk itulah diperlukan *ashabiyah* untuk mencegah semua itu. Hal tersebut menjadi perhatian oleh para cendekiawan muslim, seperti Ibnu Khaldun.

Konsep Ibnu Khaldun pada teori politik *ashabiyah* bukan sekedar kajian dan analisis perbandingan data-data yang objektif, sebagai upaya untuk memahami manusia pada masa lampau dan kini untuk mengetahui masa depan dengan berbagai kecenderungannya. Teori tentang politik *ashabiyah* inilah yang melambungkan namanya dimata pemikir modern. *Ashabiyah* secara harfiah jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia berarti solidaritas kelompok dengan cinta dan kasih sayang seorang manusia kepada saudara atau tetangganya yang terdapat pada watak manusia seperti ikatan darah, persamaan ketuhanan dan tempat tinggal.³ Maka tujuan akhir dari solidaritas kelompok untuk mempertahankan diri dan mengalahkan musuh dengan kekuasaan itu tergantung terhadap solidaritas kelompoknya.⁴

Adanya dukungan dan rasa kebersamaan, teori *ashabiyah* inilah yang melambungkan namanya dimata pemikir modern yang membedakan dari pemikir lainnya.⁵ *Ashabiyah* menurut Charles Issawi dalam buku Wendy Melfa menyatakan *ashabiyah* adalah faktor penggerak kekuasaan dan para pendukungnya untuk maju terus

¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa, Kontestualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 41.

² Abd Al Rahman Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, (Beirut: Dae al-Fikr, 2011), 50.

³ Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam, Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Kencana. 2014), 49.

⁴ Osman Baliby, *Ibnu Khaldun tentang Masyarakat dan Negara*, (Jakarta: Tanpa Penerbit, 2015), 49.

⁵ Taufiq Hidayatillah, Ibnu Khaldun, *Konsep Ashabiyah dan Teori Siklus Pemerintahan*, artikel ini di akses pada tanggal 23 Oktober 2021 <https://archivehidayatillah.wordpress.com/2012/01/28/ibnu-khaldun-konsep-ashabiyah-dan-teori-siklus-pemerintahan/>.

kedepan.⁶ Sedangkan menurut Muhammad Mahmud Rabie, *ashabiyah* merupakan suatu jalinan sosial yang dapat membangun kesatuan suatu bangsa yang dipengaruhi oleh ikatan kekeluargaan maupun persekutuan.⁷ Serta menurut Masykuri Abdullah, bahwa Ibnu Khaldun memunculkan dua kategori sosial yang sangat fundamental seperti *badawah* (komunitas pedalaman, masyarakat primitif) dan *badharah* (kehidupan kota, masyarakat beradab). Dari kedua kategori tersebut untuk bertahan dalam masyarakat kesukuan harus memiliki solidaritas kelompok atau *ashabiyah*.⁸

Jatuhnya pemerintahan orde lama kemudian muncul permasalahan dalam otonomi daerah di Indonesia sejak diberlakukannya UU No 32 Tahun 1999 yang kemudian disusul dengan UU No 32 Tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah yang secara substansial memberikan otonomi kepala daerah provinsi dan kabupaten serta pemerintah kota dapat dengan leluasa membuat peraturan berupa perundang-undangan dalam upaya mestabilisasi daerah-daerah kecil pasca reformasi. Ada beberapa hal yang menandai adanya otonomi daerah di Indonesia misalnya, pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung.

Kepala daerah merupakan aspek penting yang harus ada dalam suatu daerah. Pemilihan kepala daerah dijabat oleh seseorang yang telah memenangkan dalam pemilihan umum.⁹ Pemilu (pemilihan umum) merupakan sebuah tahapan untuk menyalurkan suatu suara dalam memilih seseorang yang akan dipilih guna bisa menempati sebuah jabatan.¹⁰ Pelaksanaan pemilu harus diterapkan dan dilaksanakan harus berdasarkan asas yang terdapat dalam pemilihan umum yaitu luberjurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil).¹¹ Pada umumnya, suksesi jabatan yang harus ditentukan dengan cara mekanisme pemilihan umum adalah presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dari pusat sampai daerah, gubernur, walikota, bupati bahkan

⁶ Wendy Melfa dan Solihin Siddiq, *Paradigma Pengembangan Masyarakat Islam: Studi Epistemologis Pemikiran Ibnu Khaldun*, (Lampung: Matakata, 2017), 72.

⁷ Muhammad Mahmud Rabie, *The Political Theory of Ibn Khaldun*, (Leiden: E.J. Brill, 2013), 265.

⁸ Antony Black, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2006), 321-322.

⁹ Afan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), 354.

¹⁰ Khoirul Saleh, *Suluk Sang Pengawas Pemilu*, (Yogyakarta: Rua Aksara, 2019), 48-49

¹¹ Yudha Pandu, *UUD 1945 & Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: CV Karya Gemilang, 2010), 39.

sampai kepala desa,¹² yang dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun sekali.¹³ Peneliti mengutip secara langsung dari peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemilu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 pasal (1) ayat (1) tahun 2011 sebagai berikut:

“Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat di Wilayah Provinsi dari Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Secara Langsung dan Demokratis”.¹⁴

Penyelenggaraan pemilihan umum pada tingkat lokal seperti biasanya dipahami masyarakat secara luas dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Melalui sebuah penyelenggaraan dalam pilkada, sebuah proses yang memiliki prosedur demokratis dilaksanakan dalam mengganti dan juga untuk mengisi jabatan kepala daerah.¹⁵ Pada pemilihan kepala daerah masyarakat yang berada di daerah wajib memilih sesuai dengan pilihannya. Mereka juga dengan bebas bisa memberikan hak suara secara langsung, tentunya dikembalikan pada pemikiran rasional yang ada di masyarakat.¹⁶

Tahun 2020 pemilihan kepala daerah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember diseluruh provinsi di Indonesia secara serentak diantaranya di provinsi Jawa Tengah sebanyak 21 kabupaten atau kota yang melaksanakan, salah satunya kabupaten Demak yang memiliki 14 kecamatan dengan pembagian 243 desa dan 6 kelurahan¹⁷ yang

¹² Fajilurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana. 2018), 1.

¹³ Indonesia Legal Center Publishing, *UNDANG-UNDANG DASAR 1945 & KONSTITUSI INDONESIA*, (Jakarta: CV Karya Gemilang, 2010), 39.

¹⁴ Lihat UU No. 15 Tentang Penyelenggara Pemilu Pasal Satu Ayat (1) Tahun 2011 Diakses pada tanggal 25 November 2021, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37656/uu-no-15-tahun-2011>.

¹⁵ Dina Lestari, “Pilkada DKI Jakarta 2017: Dinamika Politik Identitas Di Indonesia”. *Jurnal Sosiologi*, 2, no 1 (2019):31 Diakses pada tanggal 28 Oktober 2020, <https://doi.org/10.21107/sml.v2i1.5519>.

¹⁶ Idil Akbar, “Pilkada Serentak dan Geliat Dinamika Politik dan Pemerintahan Indonesia, ” *CosmoGov2*, No. 1 (2017), https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pilkada+serentak+dan+geliat+dinamika+politik+&oq=pilkad.

¹⁷ “Kelurahan dan Desa di Kabupaten Demak”, *BPS Kabupaten Demak*, diakses pada tanggal 12 Januari 2022, pukul 12.15 WIB <https://demakkab.bps.go.id/indicator/153/161/1/jumlah-desa-kelurahan-menurut-kecamatan.html>.

berbatasan langsung dengan sebelah Barat kota Semarang, sebelah Timur kabupaten Kudus, sebelah Utara kabupaten Jepara dan sebelah Selatan kabupaten Grobogan. Selain itu kabupaten Demak juga berperan sebagai berkembangnya pusat agama Islam, yang memiliki sebuah bukti terdapat 2 makam wali atau sunan besar di pulau Jawa yaitu Sunan Kalijaga dan Raden Patah, sehingga hal ini bisa menjadikan Demak memiliki nuasanya religiusnya dengan memiliki sebutan sebagai Demak Kota Wali.

Pada pemilihan kepala daerah kabupaten Demak tidak terlepas dari sosok sosok Noer Halim sebagai salah satu pendukung dalam kemenangan bupati terpilih dengan membangun koneksi karir dalam keluarga yang memiliki modal sebagai kontraktor yang sudah dikenal di kabupaten Demak. Selain itu, faktor penyebab bupati terpilih di kabupaten Demak karena masyarakatnya memiliki persekutuan atau aliansi yang sangat erat yang didasari oleh persamaan ideologi dalam solidaritas kelompok yang dilihat dari sebuah strateginya mendapatkan dukungan berdasarkan dari organisasi masyarakat dan tokoh lokal baik yang berbasis agama yang meraih simpati dari kalangan nahdyyin dengan pendukung berbasis ormas NU seperti Ansor, Fatayat dan Muslimat yang sangat masif di kabupaten Demak, maupun dukungan dari kelompok *institusional* yang organisasinya sudah mapan, memiliki jaringan yang luas, tujuan jelas dan juga bisa mempengaruhi masa,¹⁸ dukungan kelompok tersebut yaitu dari partai politik untuk memperjuangkan kekuasaan yang akan diperoleh melalui pemilihan kepala daerah.¹⁹ Selain itu dengan harapan untuk bisa menjadi sebuah kekuatan solidaritas kelompok berbasis nasionalis yang diwakili partai politik PDIP, Golkar, Demokrat sedangkan kekuatan berbasis agama ada PKB, PPP, dan PAN. Maka persamaan itu tidak lepas dari persamaan keagamaannya, karena keyakinan agama bisa memperkuat solidaritas kelompok demi mewujudkan cita-cita untuk mencapai kekuasaan atau kemenangan dalam politik dengan mensolidkan struktural dari anak ranting, pengurus anak cabang, dewan pimpinan cabang, dan bisa mengantongi 36 kursi dari fraksi dan dukungan koalisi partai politik.

Komisi pemilihan umum kabupaten Demak telah menetapkan bupati terpilih dengan hasil akhir perhitungan rekapitulasi perolehan suara yang berada di tingkat kecamatan dengan jumlah daftar pemilih

¹⁸ Mohammad Maiwan, *Kelompok Kepentingan (Interest Group), Kekuasaan dan Kedudukannya dalam Sistem Politik*, Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, 15, 2 (2016), 75-78.

¹⁹ Anwar Arifin, *Perspektif Ilmu Politik*, (Jakarta: Pustaka Indonesia, 2014), 81.

tetap kabupaten Demak yang memiliki hak suara untuk memilih sebanyak 852.886 (delapan lima puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh enam) yang tersebar di 14 kecamatan di kabupaten Demak dan hasil penelitian saat dilapangan menunjukkan hasil pemilihan kepala daerah kabupaten Demak tahun 2020 yaitu dr. Hj. Esti'anah., S.E dan KH. Ali Maksun, M.SI dengan jumlah perolehan suara sebanyak 346.878 (tiga ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh delapan) sedangkan lawan dari bupati terpilih H. Mugiyono, M.H dan Muhammad Badruddin hanya mendapatkan perolehan suara 263.624 (dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus dua puluh delapan) dan dinyatakan kalah dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Demak tahun 2020 dan hasil pleno keputusan komisi pemilihan umum kabupaten Demak menunjukan kemenangan bupati terpilih diraih oleh dr. Hj. Esti'anah., S.E.²⁰

Maka Budaya politik yang ada di tingkat nasional sampai ke daerah memiliki karakteristik dan keunikan yang sangat menarik untuk membentuk kekuasaan yang kuat dengan sebuah strategi kemenangan di dalam pemilihan.²¹ Sehingga fenomena seperti ini sudah dilakukan secara turun menurun di daerah dengan menggunakan sebuah konsep strategi yang akan dilakukan oleh perilaku politik dalam berbagai proses untuk memenangkan pada pemilihan,²²

Peneliti harus bisa memaparkan mengenai politik *ashabiyah* dengan konsepnya Ibnu Khaldun terhadap strategi kemenangan bupati terpilih dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Demak tahu 2020 dengan memiliki sebuah solidaritas kelompok yang sangat kuat.²³ Dapat dibaca dalam solidaritas kelompok untuk bisa memperoleh kemenangan harus memiliki dukungan yang sangat kuat dengan

²⁰,"Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Demak", *Bawaslu Kabupaten Demak*, diakses pada tanggal 17 Februari 2022, pukul 19.25 WIB <https://demak.bawaslu.go.id/thok-kpu-demak-tetapkan-pasangan-calon-bupati-terpilih-2020/>

²¹ Anwar Saputra, "Dinasti Politik Pemerintah Provinsi Banten Periode 2007-2014", *Jurnal Jinayah Siyasah*, 2 no 1 (2017): 24.

²² Bathoro Alim, *Perangkap Dinasti Politik dalam Konsolidasi Demokrasi*, (Jakarta: Tim Pengelola Jurnal Perbatasan Fisip Umrah), 2. Artikel ini diakses pada tanggal 3 November 2021 <http://riset.umrah.ac.id/wp-content/uploads/2013/10/PERANGKAP-DINASTI-POLITIKDALAM-KONSOLIDASI-DEMOKRASI>.

²³Muji Mulia, *Teori Ashabiyah ibn Khaldun dalam Perspektif Hukum Islam*, *Samarah Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, (3) 2, (2019), diakses pada tanggal 4 Oktober 2021 <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>.

semakin tinggi *ashabiyahnya* maka semakin kuat dukungan oleh solidaritas kelompoknya.

Demikian, penulis merasa tertarik untuk menulis riset tentang membaca politik *ashabiyah* dengan konsep Ibnu Khaldun terhadap strategi pemenangan bupati terpilih dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Demak tahun 2020 dimana persoalan seperti ini masih menarik untuk dibahas karena tema ini sangat menarik dan penting untuk diteliti karena memiliki signifikansi yang masih baru sebagai berikut: *Pertama*, peneliti mengamati strategi pemenangan bupati terpilih dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Demak pada tahun 2020. *Kedua*, peneliti mengamati faktor pendukung pemenangan bupati terpilih dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Demak tahun 2020. *Ketiga*, menganalisis strategi pemenangan bupati terpilih Kabupaten Demak dalam perspektif politik *ashabiyah* Ibnu Khaldun.

Berkat dari pandangan dan paparan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **‘MEMBACA POLITIK ASHABIYAH IBNU KHALDUN TERHADAP STRATEGI PEMENANGAN BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020’**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini akan mengkaji tentang politik *ashabiyah* dengan konsep Ibnu Khaldun terhadap strategi pemenangan bupati terpilih dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Demak tahun 2020. Lebih lanjut penelitian ini ingin mendiskusikan pemenangan bupati terpilih yang mencakup strategi dengan mensolidkan struktural partai politik, melakukan pendekatan-pendekatan yang humanis dari hati ke hati, selain itu terdapat faktor penyebab pemenangan bupati terpilih mencakup karir, koneksi dari keluarga, memiliki modal, visi misi unggul, koalisi partai politik dan organisasi masyarakat. Sedangkan analisis perspektif politik *ashabiyah* dengan konsep Ibnu Khaldun terhadap pemenangan bupati terpilih dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Demak tahun 2020 adanya solidaritas kelompok berdasarkan persamaan ideologi, organisasi masyarakat dan persamaan keagamaan.

Adapun fokus tempat pada kajian ini adalah Kabupaten Demak yang telah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia, pada tanggal 9 Desember 2020. Khususnya pada strategi pemenangan bupati terpilih Kabupaten Demak dibantu dengan penguat data atau

sumber dalam penelitian. Sedangkan fokus objek penelitian adalah bupati terpilih beserta unsur yang terlibat dalam pemilihan kepala daerah seperti Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak, Partai Politik Demokrasi Indonesia Perjuangan, Tim Pemenangan dan Bupati terpilih. Kemudian, fokus waktu yang diberikan dalam penelitian ini pada tahun 2020.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah diartikan sebagai pertanyaan untuk mengetahui ruang lingkup masalah akan diteliti dengan menggunakan identifikasi masalah, setelah memaparkan latar belakang diatas sedikit gambaran umum yang ingin diteliti oleh penulis. Maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pemenangan bupati terpilih dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Demak pada tahun 2020 ?
2. Apa faktor pendukung pemenangan bupati terpilih dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Demak tahun 2020 ?
3. Bagaimana analisis strategi pemenangan bupati terpilih Kabupaten Demak dalam perspektif politik *ashabiyah* Ibnu Khaldun ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui strategi pemenangan bupati terpilih dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Demak tahun 2020.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung pemenangan bupati terpilih dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Demak tahun 2020.
3. Untuk menganalisis strategi pemenangan bupati terpilih Kabupaten Demak dalam perspektif politik *ashabiyah* Ibnu Khaldun.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan untuk dilakukan penelitian ini, maka diharapkan hasil tulisan ini dapat memberikan sebuah bentuk gambaran yang terkait dengan membaca politik *ashabiyah* dengan konsep Ibnu Khaldun terhadap strategi pemenangan bupati terpilih dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Demak tahun 2020.

Penelitian ini juga sangat diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pihak terkait dan bagi orang yang memiliki minat dalam mengkaji yang terkait strategi pemenangan bupati terpilih terhadap membaca politik *ashabiyah* dengan konsep Ibnu Khaldun, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis pada penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi dengan mengembangkan khasanah sebuah ilmu pengetahuan pemikiran politik islam terutama pada persoalan sebuah straregi pemenangan bupati terpilih.
- b. Sebagai sumber rujukan bagi peneliti yang tengah melakukan peneltian mengenai pemilihan kepala daerah dengan studi terhadap politik *ashabiyah* Ibnu Khaldun khususnya di Kabupaten Demak.
- c. Sebagai bahan kajian yang diharapkan dapat menjadi rujukan penelitian bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis pada penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik itu bagi peneliti, instansi, partai politik demokrasi Indonesia perjuangan. maupun yang lain terutama soal mengetahui yang terkait dengan strategi politik dan suksesi kepemimpinan dalam pemenangan yang dilakukan oleh bupati terpilih pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Demak tahun 2020
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi partai politik, tim pemenangan, berbagai pihak yang bersangkutan dalam mengambil kebijakan sebuah strategi pemenangan saat pemilihan kepala daerah dan komisi pemilihan umum Kabupaten Demak yang menyelenggarakan dari berbagai tahapan dan proses dalam pemilihan.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan sumbangan pemikiran mengenai startegi pemangan pada partai politik.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi yang akan peneliti susun terbagi menjadi lima bab yang saling berkolerasi. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan terhadap tujuan yang telah difokuskan oleh peneliti. Selain itu, juga terdapat gambaran sekaligus garis dari setiap masing-masing bagian yang mana memiliki hubungan atau saling bersangkutan sehingga nantinya yang dapat diperoleh dalam penelitian sesuai dengan sistematis dan ilmiah. Adapun pembagian sistematika penulisan skripsi tersebut yang penulis susun sebagai berikut:

1. Bagian awal

Bagian ini terdiri dari sampul luar, sampul dalam, lembar pengesahan proposal, daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel.

2. Bagian isi

Bagian ini terdiri dari tiga bab, antara bab satu dengan bab lain saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh. Ketiga bab tersebut adalah:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang dilakukannya penelitian, meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Kerangka Teori

Bab ini berisi tentang deskripsi teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Kerangka teori memaparkan teori Strategi Politik, Teori Pilkada, Teori Sukses Kepemimpinan dan Teori Politik *Ashabiyah* Ibnu Khaldun. Selain itu bab ini juga berisi hasil penelitian terdahulu berupa kajian terhadap beberapa hasil penelitian berupa jurnal, skripsi, dan buku yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis teliti, serta kerangka berfikir.

BAB III : Metode penelitian

Dalam bab ini penulis memaparkan mengenai jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti. *Setting* penelitian berupa lokasi dan waktu penelitian dilakukan. Kemudian berisi subyek penelitian yang berlaku sebagai sumber utama diperolehnya data dalam penelitian ini. Selain itu, dalam bab ini dijelaskan pula mengenai sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi data penelitian dan analisis data tentang bagaimana strategi pemenangan bupati terpilih dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Demak pada tahun 2020, apa faktor pendukung pemenangan bupati terpilih

dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Demak tahun 2020 dan bagaimana analisis strategi pemenangan bupati terpilih Kabupaten Demak dalam perspektif politik *ashabiyah* Ibnu Khaldun.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang dilakukan dan dilanjutkan dengan saran-saran yang ditawarkan oleh penulis untuk menyelesaikan masalah penelitian.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini berisi daftar pustaka yang menjadi referensi peneliti dalam memecahkan masalah dan lampiran-lampiran berisi berbagai dokumen yang relevan dengan masalah penelitian.

